

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Globalisasi terjadi ketika ada interaksi antara entitas lokal dengan entitas luar. Proses globalisasi adalah proses ekstensifikasi interaksi, interaksi tidak dapat dibatasi oleh jarak dan waktu. Globalisasi sendiri telah berdampak terhadap semakin meningkatnya isu-isu keamanan seperti terorisme, ancaman keamanan lintas negara, dan proliferasi senjata pemusnah masal. Ancaman keamanan lintas negara dapat berupa perompakan, penyelundupan senjata dan bahan peledak, penyelundupan wanita dan anak-anak, imigran gelap, pembalakan liar, serta perdagangan narkoba. Masalah-masalah tersebut memerlukan penanganan bersama (lintas negara) dalam mengatasinya.¹

Adanya masalah keamanan yang membutuhkan penanganan bersama, mendorong negara-negara untuk melakukan kerjasama pertahanan. Kerjasama ini diperlukan karena setiap negara memiliki kepentingan nasional yang didasarkan kepada faktor politik, teknologi, ekonomi, maupun pertahanan keamanan itu sendiri. Menjalani suatu hubungan kerjasama pertahanan bukan berarti tanpa hambatan, proses birokrasi dan harus berkonsultasi dengan banyak pihak, tidak adanya anggaran dana yang mampu mencukupi kebutuhan.

¹ Kementerian Pertahanan RI. *"Pemetaan perluasan Kerjasama antar Negara dalam Lingkup Global dan Regional"*. (Jakarta: Direktorat Jendral Strategi Pertahanan, 2012) hal 44

Menyadari adanya berbagai hambatan dalam menjalin suatu kerjasama pertahanan membuat Indonesia berupaya keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan segala keterbatasan. Langkah-langkah yang diambil dalam memenuhi tuntutan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang memadai, serta menciptakan keamanan maka Indonesia bekerjasama dengan negara-negara lain. Indonesia mengembangkan kerjasama pertahanan dengan beberapa negara besar seperti Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, China, dan yang lebih utama dengan Rusia. Negara-negara tersebut memegang peranan yang sangat penting bagi perdamaian dunia dan juga dalam perkembangan ekonomi.

Hubungan kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan terjalin sejak pembukaan diplomatik kedua negara yang terjadi pada tahun 1966 dan terus mengalami perkembangan dan peningkatan dalam berbagai bidang. Sedangkan untuk kerjasama militer sendiri bermula dari pembelian KT-1B *Woong Bee* yang menjadi pesawat latih bagi penerbang TNI AU tahun 2003.² Dalam kaitan tersebut Indonesia dan Korea Selatan telah menyepakati kerjasama, kegiatan di bidang pertahanan, antara lain melalui nota kesepahaman dan perjanjian di bidang logistik, kerjasama industri serta barang dan jasa untuk kepentingan pertahanan. Adanya pertukaran perwira untuk mengikuti pendidikan pengembangan, dalam beberapa tahun terakhir, pertukaran kunjungan pejabat tinggi pertahanan dan militer kedua negara berlangsung cukup baik, ini mengindikasikan bahwa hubungan pertahanan kedua negara semakin penting.³

² *Ibid* hal. 57

³ Departemen Pertahanan Republik Indonesia. “Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008”. (Jakarta: Dephan RI, 2008), hal. 149

Indonesia dengan China telah memulai kerjasama pertahanan dalam kerangka kemitraan strategis yang ditandatangani kedua negara pada bulan April tahun 2005, kedua negara terus meningkatkan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan seperti: konsultasi pertahanan, pertukaran kunjungan pejabat, pelatihan personel, kerjasama industri pertahanan (Idhan), latihan militer bersama, tukar menukar pengetahuan dan keterampilan dalam rangka *capacity building* untuk meningkatkan profesionalisme kedua angkatan bersenjata.⁴ Dengan demikian, kedua negara ini akan memiliki angkatan bersenjata yang professional.

Kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat berlahan-lahan mulai membaik paska pencabutan embargo pada tahun 2006, AS mengembalikan pesawat tempur F-5 Tiger TNI AU yang sempat tertahan AS untuk dimodernisasi. AS secara gencar mempromosikan produk-produk senjatanya untuk menguasai pasar Indonesia seperti era tahun 1990an, namun hal ini tetap harus diperhatikan oleh Indonesia mengingat embargo yang pernah dilakukan tersebut, yang membuat angkatan bersenjata Indonesia mengalami penurunan dratis.

Hubungan Indonesia dengan Rusia (dulu Uni Soviet) telah terjalin sejak Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan Rusia di bawah Perdana Menteri Nikita Khrushchev. Pada tahun 1948 Rusia mengakui kemerdekaan Indonesia secara *de-facto* yang kemudian disusul pengakuan secara *de-jure* pada tanggal 3 Februari tahun 1950. Hal ini kemudian menjadi rujukan hubungan resmi diplomatik kedua negara hingga sekarang.

⁴<http://hankam.kompasiana.com/2013/10/18/hubungan-pertahanan-china-dan-indonesia-602603.html>, 29/11/13 jm 14.30

Kerjasama pertahanan Indonesia dengan Rusia dimulai sejak era Uni Soviet. Awal tahun 1961, di Kremlin ditandatangani kontrak pembelian senjata atas dasar kredit jangka panjang yang tidak memberatkan Indonesia. Sebagai bagian dari Uni Soviet, Rusia adalah salah satu negara yang kuat dan terus menerus memberikan dukungan kemerdekaan Indonesia. Apabila sepanjang tahun 1950-1991 hubungan Indonesia-Rusia banyak dituntun faktor ideologi akibat Perang Dingin, maka sejak tahun 1991 sampai sekarang hubungan bilateral ini lebih didominasi oleh pertimbangan pragmatis.⁵

Bentuk-bentuk kerjasama yang terjalin dengan Rusia pada saat pemerintah Presiden Soekarno tidak hanya terfokus pada militer saja tetapi juga adanya bantuan dana untuk rakyat Indonesia, dana untuk pembangunan Tugu Monumen Nasional (Monas) yang pemancangan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1961, serta pembangunan kompleks Stadion Olahraga Senayan, bantuan terbesar Uni Soviet adalah dukungannya pada perjuangan Indonesia merebut Irian Barat dari tangan Belanda.⁶

Hal ini dilatarbelakangi sikap AS yang menentang usaha-usaha pengembalian Irian Barat dari Belanda, serta AS yang tidak mau membawa masalah ini ke sidang Dewan Keamanan PBB.⁷ Serta adanya hubungan persahabatan yang akrab di antara kedua pemimpin bangsa. Pada masa kekuasaan Soekarno meskipun dikatakan politik Indonesia adalah bebas aktif dan Non Blok namun dalam kerangka perjuangan anti-imperialisme, Soekarno sebenarnya

⁵ Tomi Lembang. "Sahabat Lama Era Baru". (Jakarta:Grasindo, 2010), hal. 130

⁶ *Ibid* hal. 16

⁷ Toto Prbadi, dkk. Sistem Politik Indonesia. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hal. 8.29

banyak merapat ke Uni Soviet. Semata-mata sebagai perjuangan untuk mengembalikan keutuhan NKRI.

Pada saat itu adanya perbedaan pandangan ideologi telah lebih dahulu diperbincangkan. Pada tahun 1956 rombongan DPR yang dipimpin Sartono SH, datang ke Moskwa dan Leningrad (sekarang St. Petersburg) untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan tersebut. Kunjungan Presiden Soekarno selama 14 hari pada tahun 1956 menghasilkan kesepakatan dengan Uni Soviet mengenai prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai.⁸ Pemikiran Soekarno mengenai ke ‘Bhinneka Tunggal Ika’-an yang mengakui dan menghargai keberagaman tetapi bisa hidup bersama, dipandang Rusia sangat relevan. Soekarno yang tidak pernah mengizinkan Indonesia sebagai negara agama, walaupun Ketuhanan Maha Esa ditempatkan sebagai sila pertama Pancasila.⁹ Tujuan utama kerjasama saat itu ialah untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

Hubungan kerjasama Indonesia dan Rusia sempat mengalami kemunduran sangat tragis pada masa pemerintahan Orde Baru, dengan adanya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965. Orde Baru lebih mementingkan pembangunan dan pencapaian ekonomi sehingga lebih memilih untuk pro ke negara Barat yang dapat memberikan solusi bagi pembangunan di Indonesia. Keputusan inilah yang membuat Uni Soviet yang anti barat menjaga jarak dalam hubungannya dengan Indonesia. Kebijakan politik negara-negara Barat adalah membendung pengaruh

⁸ Tomi Lembang, *op.cit.* hl 131

⁹ *Ibid* hal 20

komunis bagi negara-neagra yang berhubungan dengannya maka akan semakin membatasi hubungan Indonesia dengan Uni Soviet dan sekutunya.

Hingga tiba era baru di Soviet, runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin mempengaruhi perubahan peta politik internasional, termasuk memengaruhi hubungan Indonesia-Rusia. Pemerintah Indonesia mengakui federasi Rusia sebagai penerus Uni Soviet pada tanggal 28 Desember 1991, hanya berselang tiga hari setelah Uni Soviet dinyatakan bubar. Hal ini belum memberikan banyak perubahan yang berarti hingga tahun 2003.

Pada tanggal 21 April tahun 2003, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri merupakan awal hubungan baru, dalam kunjungan resmi ke Rusia, bersama Presiden Rusia Vladimir Putin kedua kepala negara menandatangani deklarasi mengenai “Dasar hubungan persahabatan dan kemitraan diantara Rusia dan Indonesia dalam abad 21”.¹⁰ Vladimir Putin presiden Rusia juga menyepakati dilakukannya kerjasama teknik dan militer yang lebih erat di masa depan.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada tahun 2005 dibentuk komisi bersama antar pemerintah dalam bidang kerjasama teknik-militer sesuai dengan kesepakatan tahun 2003. Agenda pokoknya adalah pembuatan memorandum program kerjasama, protokol bidang pembiayaan kredit, dan kerjasama dalam bidang proyek industri.¹¹

Pada tahun 2006 Presiden SBY melakukan kunjungan ke Moskwa yang kemudian dibalas dengan kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Indonesia pada tahun 2007. Hubungan Indonesia-Rusia kini tidak ada lagi hubungan ideologi,

¹⁰ *Ibid* hal 45

¹¹ *Ibid* hal. 58

pembagian dunia, tidak juga bekas “Perang Dingin”. Dasarnya adalah kepentingan nasional Indonesia dan Rusia yang pragmatik¹².

Menolehnya Indonesia ke Rusia dalam urusan persenjataan militer di masa sekarang adalah untuk menyeimbangkan politik luar negeri agar tidak terlalu bergantung kepada Barat, terutama AS. Disamping itu untuk kepentingan pertahanan dan ekonomi. Untuk kepentingan pertahanan yaitu agar mampu meningkatkan kemampuan militer TNI dengan pengadaan alutsista modern. Di bidang ekonomi termasuk prioritas kebijakan domestik yang harus dipenuhi. Hal ini melahirkan kerjasama dengan Rusia di berbagai segi kehidupan.

Adanya embargo Amerika Serikat terhadap Indonesia mulai tahun 1996 dan secara resmi pada tahun 1999 menutup pintu penjualan senjatanya serta suku cadangnya dengan alasan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer Indonesia saat penembakan di Santa Cruz Timor-Timur.¹³ Hal inilah yang kemudian memperbaiki hubungan yang sempat turun dengan Rusia. Rusia berkomitmen untuk tidak ikut campur dalam segala permasalahan dalam negeri Indonesia yang melibatkan alutsista, dan Rusia memandang Indonesia sebagai mitra penting untuk membangun kemitraan strategis.

Rusia sebagai negara yang memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan negara lain baik itu di bidang militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumberdaya manusia, sejarah dan peradabannya, sumber mineral. Rusia dalam menjual produk pertahanan militer sama kualitasnya dengan produk yang digunakan Rusia sendiri, tidak ada istilah *downgrade*. Rusia tidak keberatan

¹² *Ibid* hal. 56

¹³ *Ibid* hal. 46

dalam hal transfer teknologi dan modifikasi teknologi. Rusia memberikan pinjaman lunak dan juga menerima komoditi untuk imbal dagang antara lain produk minyak sawit (*crude palm oil*) dan karet dengan total imbal beli lebih kurang US\$ 175 juta (sekitar Rp 1,54 triliun), saat Megawati menyepakati tentang kerjasama pembelian alatista tahun 2003.¹⁴

Selain kerjasama pertahanan, Indonesia-Rusia juga membuka kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Kerjasama ini meningkat setelah kunjungan Presiden SBY tahun 2006 ke Rusia yang kemudian dibalas Presiden Vladimir Putin pada tahun 2007. Tahun 2006 volume perdagangan relative kecil yakni US\$ 680 juta, dan terus mengalami peningkatan tahun 2007 mencapai US\$ 1 miliar hingga tahun 2008 telah mencapai US\$ 1,6 miliar.¹⁵

Secara mendasar kerjasama pertahanan lebih dikembangkan untuk membangun saling percaya, mengkomunikasikan isu-isu keamanan (keamanan tradisional maupun non tradisional) yang dapat ditangani secara bersama, termasuk mendorong peningkatan kapabilitas pertahanan. Sesuai dengan prinsip pertahanan yang dianut oleh Indonesia yaitu *defensive* aktif sehingga penyelesaian sebuah konflik dengan lebih mengutamakan cara-cara damai. Prinsip '*thousand friend and zero enemy*' masih menjadi pertimbangan utama dalam menjalin hubungan dengan negara lain.¹⁶ Ini merupakan pengembangan dari politik luar negeri "bebas aktif". Politik luar negeri Indonesia mempunyai landasan ideal dan konstitusional, Pancasila adalah landasan ideal yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 ditetapkan sebagai falsafah negara

¹⁴ *Ibid* hal. 47

¹⁵ *Ibid* hal. 67

¹⁶ Kementerian Pertahanan RI, *op.cit.* hal. 55

Republik Indonesia. UUD 1945 beserta pembukaannya merupakan landasan konstitusional yang memuat tujuan-tujuan bangsa.

Dalam usaha penangkalan terhadap berbagai upaya ancaman militer atau ancaman bersenjata lainnya yang datang dari luar atau dalam negeri yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, Indonesia memiliki angkatan bersenjata yang diberi nama Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI sendiri di bagi menjadi TNI AL (Angkatan Laut), TNI AD (Angkatan Darat), TNI AU (Angkatan Udara), TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).¹⁷

Seiring perkembangan jaman kekuatan udara kini memegang peranan penting, dimana patroli yang dilakukan melalui darat dan laut menjadi kurang efektif mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas dengan medan yang berat, terutama di wilayah perbatasan untuk mengamankan wilayah Indonesia. Sehingga diperlukan armada angkatan udara yang kuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mengawasi dan juga mengamankan wilayah Indonesia dari segala macam ancaman yang datang dari dalam maupun luar, hal ini sesuai dengan UU (Undang

¹⁷ Kemanuggalan ABRI-Rakyat. Terbaik untuk Rakyat, Terbaik bagi ABRI. (Jakarta: Pusat Penerangan ABRI, 1995), hal. 40

– Undang) Republik Indonesia No.34 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 10, dan Peraturan Presiden RI nomor 10 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang tugas utama TNI Angkatan Udara.

Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) merasakan pembaharuan dengan adanya persenjataan baru dari Rusia, membuat persenjataan AU meningkat baik mutu maupun jumlahnya dan meningkatkan kemampuan personilnya. AURI lahir setelah Belanda membangun pangkalan-pangkalan udara di Indonesia pada tahun 1930-an untuk menahan laju armada Jepang yang sangat ditakuti oleh Barat. Para penerbang didikan Belanda inilah yang dikemudian hari jadi pelopor lahirnya AURI pada tanggal 9 April 1946 dan tanggal ini ditetapkan sebagai hari TNI AU sampai saat ini.

Kerjasama pertahanan antara Indonesia-Rusia akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan sayap, mampu membangkitkan kejayaan TNI AU yang dulu sempat diperhitungkan oleh negara-negara sekitar. Bermitra dengan Rusia menunjukkan kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap bebas dan aktif, Rusia juga membuka peluang yang lebih luas dalam segala bidang bukan saja dalam militer tetapi juga bidang lain seperti pariwisata, dan juga ekonomi, mempergunakan senjata standar dengan yang digunakan oleh Rusia sendiri. Rusia dalam membuat kesepakatan tentang persenjataan tidak akan serumit Amerika Serikat yang harus lama melewati keputusan senat.

2. Rumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang penulisan skripsi ini, maka rumusan masalah yang diajukan adalah:

- a. Bagaimana gambaran kerjasama pertahanan Indonesia-Rusia dan apa yang melatarbelakangi kerjasama tersebut?.
- b. Apa implikasi kerjasama pertahanan Indonesia-Rusia terhadap perkembangan kekuatan TNI AU (2003-2012)?.

3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

3.a Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini RTH antara lain yaitu:

1. Memahami dan memberikan gambaran mengenai alasan-alasan yang menyebabkan Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan Rusia.
2. Memahami implikasi kerjasama pertahanan Indonesia-Rusia terhadap kebijakan khususnya TNI AU.

3.b Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia.

- b. Penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan sumbagan pemikiran untuk mengembangkan ilmu Hubungan Internasional dalam menjalin suatu hubungan kerjasama pertahanan.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan kerjasama pertahanan.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan kerjasama pertahanan.

4. Kerangka Teori

Dalam menelaah topik dan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka teori diplomasi pertahanan serta kerjasama pertahanan akan digunakan untuk menganalisis lebih dalam tentang diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Rusia pada periode 2003-2012.

4.a Teori Diplomasi Pertahanan

Diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.¹⁸ Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.¹⁹ Karena diplomasi dalam prosesnya lebih

¹⁸ S.L. Roy, "Diplomasi ", (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1991), hal. 3.

¹⁹ *Ibid* hal 5

mengutamakan negosiasi dengan cara-cara damai serta mengakomodasi kepentingan suatu negara.

Menurut Morgenthau dalam *Politics Among Nations* ada 3 sarana diplomasi yang sangat menentukan yaitu bujukan (*persuasion*), kerjasama (*compromise*), dan ancaman kekerasan (*threat of force*). Untuk mencapai tujuan diplomatiknya suatu negara menerapkan satu atau kombinasi beberapa prinsip utama diplomasi yaitu sama (perdamaian atau negosiasi), dana (memberi hadiah atau konsesi), denda (menciptakan perselisihan) dan bedha (mengancam atau menggunakan kekuatan nyata).²⁰

Sedangkan *Defense* atau pertahanan merupakan usaha penciptaan keamanan untuk menghadapi ancaman maupun serangan. Pengembangan kapabilitas pertahanan perlu dilakukan oleh negara karena kondisi sistem internasional yang bersifat anarki, sehingga terjadinya serangan yang dilakukan oleh negara satu ke negara lain untuk mencapai kepentingannya menjadi kemungkinan yang tidak dapat dihindari.²¹

Secara tradisional peran militer atau kekuatan pertahanan ditujukan untuk pertahanan negara baik melalui fungsi-fungsi penangkalan, pertahanan, intervensi. Militer di masa lalu ditujukan untuk menggalang kerjasama strategis atau aliansi atas dasar-dasar pertimbangan politik nyata dan kepentingan pertahanan nasional.

Diplomasi sebagai dasar pertimbangan politik nyata dan kepentingan pertahanan nasional. Saat ini, diplomasi pertahanan mencakup *pertama*, upaya untuk membantu membina hubungan dengan negara-negara bekas musuh dan

²⁰ *Ibid* hal 16

²¹ Robert Jervis .Cooperation Under Security Dillema. dalam *World Politics*, Vol. 30, No. 2 (Januari 1978), hal. 167-214.

untuk mengembangkan apa yang disebut pembangunan kepercayaan (*Confidence Building Measures*).²²

Confidence Building Measures (CBM) bertujuan untuk menciptakan saling pengertian mengenai perspektif dan dilema strategis masing-masing peserta dan dari situ menuju kearah pembangunan saling kepercayaan, sasarannya ialah untuk mengurangi ketegangan dan kecurigaan. *Kedua*, diplomasi pertahanan juga ditujukan untuk membantu mengembangkan politik atas militer dan pembentukan tata pemerintahan yang baik di bidang pertahanan. *Ketiga*, diplomasi pertahanan juga digunakan untuk memberikan sumbangan kepada upaya-upaya perdamaian dunia seperti misi-misi perdamaian dunia. Diplomasi pertahanan juga bisa membentuk persepsi bersama tentang suatu masalah dan *mind-set* militer negara lain.

Menurut Andrew Cottey dan Anthony Forster diplomasi pertahanan secara tradisional merupakan penggunaan kekuatan persenjataan dan infrastruktur dan instrumen yang mendukungnya sebagai alat dalam kebijakan keamanan dan luar negeri. Dalam sejarahnya, diplomasi pertahanan biasanya dilakukan dalam bentuk kerjasama pertahanan dan bantuan militer, yang merupakan bagian dari *realpolitik* internasional dan perimbangan kekuatan untuk memenuhi kepentingan nasional.

Konsep ini kemudian berubah semenjak berakhirnya Perang Dingin dimana diplomasi pertahanan merupakan pendayagunaan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata sebagai cara untuk membangun hubungan kerjasama

²² C.P.F Luhulima. "Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015". (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal 181

dengan negara lain, dan untuk mendukung negara lain dalam melakukan perbaikan militer.

Pergeseran makna diplomasi pertahanan saat ini terjadi, dimana kerjasama pertahanan dilakukan untuk memenuhi tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih luas. Diantaranya *pertama*, kerjasama dan bantuan militer digunakan untuk membantu pembangunan hubungan yang lebih kooperatif dengan mantan musuh atau musuh potensial, yang disebut *strategic engagement*. *Kedua*, kerjasama dan bantuan militer digunakan untuk mempromosikan kontrol sipil demokratis sebagai usaha mendukung demokrasi liberal dan tata pemerintahan yang baik. *Ketiga*, kerjasama dan bantuan militer dilakukan untuk mendukung mitra dalam mengembangkan kapasitasnya agar dapat berkontribusi dalam operasi *peacekeeping* dan *peace-enforcement*.²³

Terdapat tiga variasi dalam perkembangan kajian mengenai diplomasi pertahanan. *Pertama*, menurut realisme klasik bahwa diplomasi pertahanan merupakan instrumen untuk pengejaran kepentingan nasional suatu negara yang terbagi ke dalam dua kategori utama yaitu: diplomasi bilateral dan multilateral, diplomasi bilateral memiliki kedalaman yang lebih efektif dari pada diplomasi multilateral. *Kedua*, diplomasi pertahanan secara tradisional yang merupakan alat kebijakan pertahanan dan keamanan serta luar negeri suatu negara. Serta perkembangan terkini dari diplomasi pertahanan yang dikembangkan untuk

²³ Andrew Cottey dan Anthony Forster. Introduction. dalam *Adelphi Papers*, 44:365, (New York: Routledge, 2004), hal. 5-6.

membangun hubungan baik dengan negara lain untuk mengurangi ketidakpastian dalam sistem internasional.²⁴

Kekuatan militer menjadi singa penjaga untuk memuluskan diplomasi agar sesuai keinginan dan kepentingan nasional pihak yang berselisih.²⁵ Kekuatan persenjataan saat ini digunakan sebagai kekuatan diplomasi untuk meningkatkan tawar suatu negara terhadap negara lain, militer digunakan untuk menjaga kekuatan investasi dan diplomasi.

Diplomasi pertahanan dilakukan, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan. Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan sangat bergantung pada upaya diplomatik yang dilakukan di tingkat global, regional dan bilateral.²⁶

4.b Teori Kerjasama Pertahanan

Pola hubungan antar negara menurut Holsti dibagi menjadi dua bentuk yaitu konflik dan kerjasama. Konflik adalah kondisi adanya suatu perbedaan pendirian antar kelompok termasuk posisi yang hendak dicapai. Sedangkan kerjasama atau kolaborasi adalah persetujuan atas masalah tertentu antara dua

²⁴ Idil Syawfi. "Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)". (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009). Hal 40

²⁵ Mayor Jendral TNI Syarifudin Tippe. Menuju Konsep Pertahanan Modern. (Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia, 2010), hal. 16

²⁶ Widjajanto. "Diplomasi Pertahanan Indonesia-AS", dalam <http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006111312>, diakses tanggal 5 Desember 2013, jam 22.35 WIB

negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.²⁷

Kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling memengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antara dua pihak.²⁸ Kerjasama ini akan tercipta apabila telah muncul adanya rasa saling percaya dan ketergantungan, setiap negara tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya dengan sendiri meskipun negara tersebut kaya.

Hubungan timbal balik kerjasama antar Indonesia-Rusia ini bisa dilihat, dimana Indonesia membutuhkan peralatan militer untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dalam menjaga wilayah NKRI, dan Rusia menyediakan hal tersebut dengan kriteria yang bisa dipenuhi oleh Indonesia. Disisi lain Rusia membutuhkan minyak sawit mentah dan karet untuk kebutuhan industrinya, dan Indonesia mempunyai komoditi tersebut lebih dari yang di butuhkan dalam negeri maka terjadi kerjasama yang saling menguntungkan.

Secara sederhana suatu hubungan pertahanan merupakan ikatan jaringan antar dua atau lebih negara melalui angkatan-angkatan bersenjata nasionalnya dan birokrasi badan penelitian, pengembangan dan industri pertahanan dan birokrasi pertahanan. *Defence relationship* merupakan suatu elemen atau subordinat dari hubungan keamanan (*security relationship*). Jika *defence relationship* merupakan wilayah kegiatan menteri pertahanan, departemen pertahanan dan angkatan bersenjata maka *security relationship* mencakup ketiga lembaga yang

²⁷ K.J. Holsti. "Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis". (Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1987), hal. 392-394

²⁸ Anak Agung Bayu Perwita & Yayan Mochamad Yani. "Ilmu Hubungan Internasional". (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2005, hal 42

bertanggung jawab dalam hal pertahanan tersebut juga mencakup departemen-departemen pemerintahan lainnya.²⁹

Menurut pendapat Peter Toma dan Robert Gorman, negara-negara dalam melakukan kerjasama di dorong oleh beberapa faktor dan alasan yaitu memperjelas kepentingan, dalam rangka menjalin stabilitas perdamaian, ajakan untuk kemakmuran ekonomis, serta faktor eksternal.³⁰ Menjalinkan stabilitas perdamaian dengan tidak mengganggu kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah, kepribadian nasional. Kehidupan nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi atau tekanan dari luar. Kemakmuran ekonomis hal ini merupakan soal berbagi hasil dalam proses pertukaran, perdagangan yang berorientasi ke pasar luar negeri. Faktor eksternal yang perlu mendapatkan perhatian adalah semakin mengikatnya kejahatan lintas negara, konflik laut China Selatan, teknologi dan informasi yang berputar dengan cepat.

Kerjasama dengan negara lain yang dilakukan oleh kementerian pertahanan tentu lebih berdimensi dan spesifik dalam bidang pertahanan (militer) meskipun dimensi pertahanan dapat dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, politik maupun teknologi.³¹ Kerjasama pertahanan tidak mengubah kebijakan politik dengan negara lain, dan kerjasama pertahanan dapat menopang upaya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sains dan teknologi, khususnya di bidang industri pertahanan. Selain itu, pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip

²⁹ Bigadier A. J. Molan. *"The Australian-Indonesian Defence Relationship"*. (Canberra: Australian College of Defence and Strategic Studies, August 1997), Hal. 3-5 dikutip Ikrar Nusa Bakti. "Bantuan Luar Negeri Australia di bidang keamanan". dalam Adriana Elizabeth (Ed), *Kebijakan Bantuan Luar Negeri Australia kepada Indonesia*. (Jakarta: P2P LIPI, 2004). hal. 62-63.

³⁰ Kementerian Pertahanan RI, *op.cit.* hal. 44

³¹ Tomi Lembang, *op.cit.* hal. 45

persamaan terhadap keuntungan bersama, penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara dan dapat bermanfaat baik peningkatan kapasitas dan kemampuan pertahanan Indonesia secara komprehensif.

Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pertahanan, suatu negara terlibat dalam kerjasama pertahanan, menyediakan bantuan kepada negara lain dengan tujuan untuk mengimbangi kekuatan pertahanan, mengelola perluasan pengaruh, dan menekan lawan politik domestik atau memposisikan kepentingan komersial.³²

Keamanan merupakan sesuatu yang mutlak diperjuangkan oleh negara untuk melindungi wilayah dan kedaulatannya dari berbagai ancaman, ketika era yang berjalan sekarang militer tidak lagi dinomorsatukan dalam menyelesaikan masalah bukan berarti militer bisa mengurangi kemampuannya. Militer tetap dibutuhkan untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan Republik Indonesia.³³

Pola hubungan Internasional yang telah mengalami perubahan setelah berakhirnya Perang Dingin, ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1990-an telah mengakhiri semangat sistem internasional bipolar dan berubah menjadi mutipolar. Yang dulunya persaingan antara Blok Barat dengan Blok Timur dengan nuansa militer, kini berubah kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi diantara negara-negara di dunia. Masalah-masalah seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup dan terorisme juga telah mendapatkan tempat untuk mendapatkan kajian karena semakin tingginya kesadaran manusia

³² Hans J. Morgenthau. "Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace". (New York: Alfred Knopf, 1948), hal. 6.

³³ C.P.F Luhulima *op.cit.* hal 125

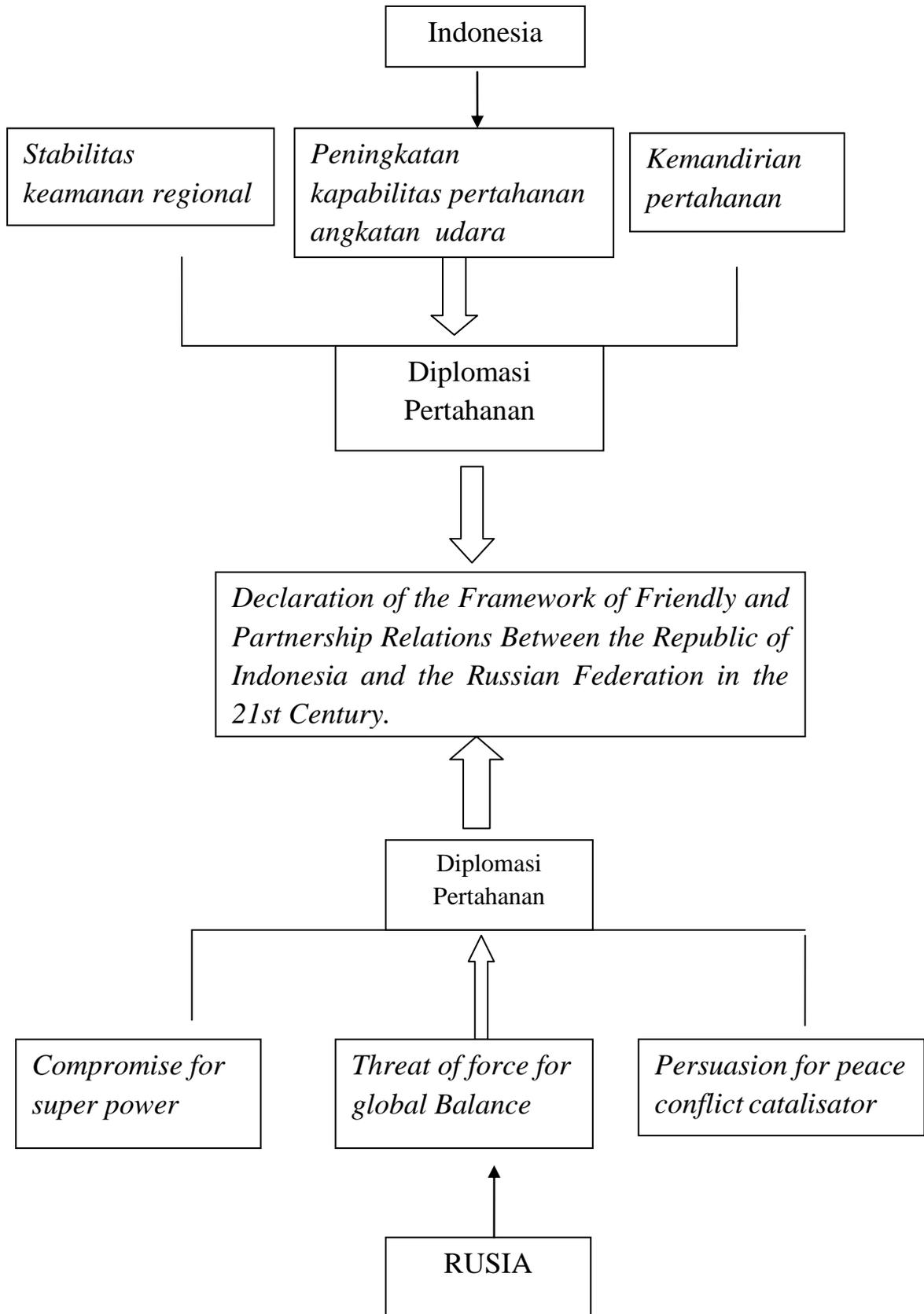
bukan saja masalah militer yang perlu mendapat perhatian tetapi hal-hal tersebut juga akan menentukan keamanan suatu negara.³⁴

5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dari penulisan skripsi ini maka penulis merumuskan kerangka pemikiran, apa yang menjadi latar belakang hingga Indonesia menjatuhkan pilihan kerjasama pertahanan terhadap Rusia, keuntungan apa yang dapat diperoleh bukan saja untuk jangka pendek tetapi untuk jauh kedepannya. Bentuk-bentuk kerjasama pertahanan yang seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia mengingat bentuk geografis Indonesia yang begitu strategis dari berbagai ancaman.

³⁴ Anak Agung Bayu & Yayan Mochamad Yani. *op.cit.* Hal. 119

6. Kerangka Analisis



7. Metodologi Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif dimana tekanan penelitian kualitatif ada pada proses bukan pada hasil. Data dan informasi yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana untuk mengungkap proses bukan hasil suatu kegiatan.³⁵ Dengan cara peneliti mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut, penelitian kualitatif sifatnya induktif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni fakta empiris. Prosesnya induktif yaitu dari data yang terpisah namun saling berkaitan.

Penelitian kualitatif pada prosedur analisis data tidak memerlukan tabulasi dan tidak perlu rumus statistik, tetapi data kualitatif (misal transkripsi hasil observasi) harus dianalisis dengan cara membaca baris demi baris, diberi kode dan dicari inti dari kata tersebut. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan penelitian pustaka terhadap data-data yang berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Informasi yang diperoleh dituangkan dalam bahasa yang dapat menjelaskan hubungan antara data satu dengan data lainnya sehingga dapat diperoleh kebenaran atas informasi tersebut.

Penelitian skripsi ini merupakan diskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat. Penelitian ini menggambarkan situasi atau kejadian, data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, tidak menguji hipotesis, tidak membuat

³⁵ <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/> 22/01/2014 jam 23.55 WIB

prediksi. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi.

Dengan demikian peneliti bermaksud untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai kerjasama pertahanan Indonesia-Rusia sebagai era baru yang terjalin kembali mulai tahun 2003, setelah sekian tahun mengalami kemunduran semenjak naiknya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, serta implikasinya terhadap perkembangan TNI AU hingga tahun 2012.

8. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kepustakaan (library research), yaitu melalui pengumpulan dan pemilihan data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, internet, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang telah didokumentasikan mengenai kerjasama pertahanan antara Indonesia-Rusia. Adapun lokasi penelitian yang peneliti kunjungi diantaranya:

1. Perpustakaan Universitas Kristen Indonesia, Jln. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang, Jakarta.

2. Perpustakaan Kementerian Pertahanan RI, Jl. Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Pusat .
3. Perpustakaan Freedom, Jl. Proklamasi No.41, Jakarta Pusat.

9. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini disusun dalam bentuk skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I, membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari latarbelakang permasalahan, permasalahan, kerangka teori dan metodologi penelitian.
2. BAB II, membahas tentang Gambaran umum TNI, TNI AU, Kebijakan TNI AU.
3. BAB III, membahas tentang Pentingnya Pertahanan bagi Indonesia, Diplomasi Pertahanan Indonesia terhadap Rusia sebelum tahun 2003, dan tahun 2003-2012.
4. BAB IV, membahas tentang Kerjasama Pertahanan Indonesia-Rusia dan Implikasinya terhadap TNI AU.
5. BAB V, bab ini merupakan bab penutup yaitu kesimpulan dari penelitian.